

LAPORAN

Forum Konsultasi Publik

Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2022



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena atas perkenan-Nya laporan pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik (FKP) Tahun 2020 Dalam Rangka Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Sebagaimana diketahui bersama, konsep partisipasi dalam penyelenggaraan negara lahir sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, setiap orang dihargai sebagai makhluk moral dan rasional yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab atas dirinya sendiri. Sehingga, hanya dalam sistem politik demokrasi, partisipasi yang sesungguhnya dimungkinkan hidup dan berkembang. Demokrasi dan partisipasi adalah ibarat dua sisi sekeping mata uang yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Demikian eratnya hubungan keduanya, Robert A. Dahl mengatakan bahwa demokrasi hanya dapat dibangun dengan partisipasi, di mana semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan.

Berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah mengamanatkan partisipasi masyarakat menjadi bagian dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu kebijakan. Secara khusus, terkait dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) secara tegas menyebutkan bahwa salah satu tujuan SPPN adalah untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dalam rangka mengakomodasikan kepentingan masyarakat pada proses penyusunan rencana pembangunan nasional seperti pada rencana kerja pemerintah (RKP). Sejak tahun 2018, dalam proses penyusunan RKP, Pemerintah telah mengimplementasikan pendekatan “THIS” Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial. Tujuan penggunaan pendekatan ini adalah untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran agar lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional yang sesuai dengan visi dan misi Presiden.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan RKP, pada Pasal 10 ayat 1 huruf c, menyebutkan bahwa penyiapan rancangan awal RKP dan pendanaannya, salah

satunya meliputi temu konsultasi publik untuk menjaring aspirasi pelaku pembangunan. Terlihat jelas bahwa pelaksanaan proses pembangunan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan partisipasi publik, oleh karena itu pemerintah berupaya secara berkesinambungan untuk meningkatkan peran publik dalam proses perumusan kebijakan pembangunan, terutama dalam RKP. Laporan Kegiatan FKP 2020 dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal RKP 2022 tentu tidak berhenti sampai disini, karena sedianya partisipasi publik pada berbagai kanal pembangunan nasional juga merupakan cerminan dari praktik demokrasi yang baik. Saya berharap bahwa partisipasi publik yang konstruktif dari masyarakat dapat dilanjutkan kembali pada forum-forum pembangunan lainnya.

Jakarta, Januari 2021

**Staf Ahli Menteri PPN/BAPPENAS
Bidang Hubungan Kelembagaan,**

Diani Sadiawati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tujuan	4
1.3. Ruang Lingkup Kegiatan.....	4
1.4. Hasil yang Diharapkan.....	5
1.5. Pelaksana Kegiatan	5
BAB 2 PELAKSANAAN KEGIATAN	6
2.1. Mekanisme Kegiatan	7
2.1.1. Pra Pelaksanaan	7
2.1.2. Pelaksanaan	7
2.1.3. Pasca Pelaksanaan.....	8
2.2. Metode Pengumpulan Data dan Informasi	9
2.3. Metode Analisis	10
BAB 3 HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	11
3.1. Proses Pelaksanaan Kegiatan	12
3.1.1. Gambaran Umum.....	12
3.2. Rencana Tindak Lanjut.....	18
BAB 4 PENUTUP	19
4.1. Kesimpulan	20
4.2. Saran.....	20
DAFTAR LAMPIRAN.....	21

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep partisipasi dalam penyelenggaraan negara lahir sebagai konsekuensi dari sistem demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, setiap orang dihargai sebagai individu yang memiliki kebebasan dalam menyampaikan pendapat sebagai bentuk kontribusi pada pembangunan nasional. Sehingga, hanya dalam sistem politik demokrasi, partisipasi dimungkinkan hidup dan berkembang. Demokrasi dan partisipasi adalah ibarat dua sisi kepingan mata uang yang tidak terpisahkan. Demikian eratnya hubungan keduanya, Robert A. Dahl mengatakan bahwa demokrasi hanya dapat dibangun dengan partisipasi, di mana semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan serta dalam proses pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Lebih lanjut, kedua prinsip demokrasi tersebut juga harus dilengkapi dengan prosedur demokrasi yang utuh untuk menjamin bahwa demokrasi tetap berjalan serta menghormati hak rakyat yang terlibat.

Berbagai peraturan perundang-undangan maupun kebijakan telah mengamanatkan partisipasi masyarakat menjadi bagian dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi suatu kebijakan. Secara khusus, terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan nasional, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pada pasal 2 ayat 4 huruf d secara tegas menyebutkan bahwa salah satu tujuan SPPN adalah untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat pada penyusunan rencana pembangunan nasional salah satunya adalah rencana kerja pemerintah (RKP) yang disusun oleh pemerintah pusat. Dalam proses penyusunan RKP 2021, Pemerintah telah mengimplementasikan pendekatan "THIS" (Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial) begitu juga dalam proses penyusunan RKP 2020. Tujuan penggunaan pendekatan ini adalah untuk meningkatkan keterpaduan perencanaan dan penganggaran agar lebih berkualitas dan efektif dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional yang sesuai dengan visi dan misi Presiden. Selain itu pendekatan THIS juga dimaksudkan untuk memastikan bahwa suara dan masukan masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan tema RKP.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas No. 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan RKP,

pada pasal 8 ayat 1 huruf a, menyebutkan bahwa penyiapan rancangan awal RKP dan pendanaannya, salah satunya harus meliputi temu konsultasi publik sebagai sarana untuk menjaring aspirasi pelaku pembangunan. Terlihat jelas bahwa pelaksanaan proses pembangunan dilakukan secara inklusif dengan melibatkan partisipasi publik, oleh karena itu pemerintah berupaya secara berkesinambungan untuk meningkatkan peran publik dalam proses perumusan kebijakan pembangunan, terutama dalam RKP.

Pada umumnya FKP dilakukan secara tatap muka dengan melibatkan berbagai Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yang mewakili berbagai bidang. Namun menimbang kondisi penyebaran COVID-19 saat ini, dengan berbagai pertimbangan maka FKP tidak dapat dilaksanakan dengan tatap muka seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun FKP tidak dapat dilakukan secara tatap muka, namun kami memastikan bahwa masukan dari OMS tetap dapat disampaikan melalui *website* FKP dan webinar yang akan menghadirkan pemerintah dan OMS. Dalam kondisi pandemi COVID-19 saat ini, BAPPENAS merasa bahwa masukan dari masyarakat khususnya yang pihak terdampak COVID-19 sangat diperlukan sehingga pemerintah dapat melakukan evaluasi kebijakan yang sudah ada serta merumuskan kebijakan mendatang yang lebih implementatif dan tepat sasaran.

BAPPENAS selaku *clearing house* terus memastikan bahwa kebijakan yang dirumuskan dapat dilaksanakan dan memberikan dampak yang signifikan pada pemulihan pasca COVID-19 pada berbagai sektor. Salah satu bagian penyesuaian antara perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan menimbang kondisi COVID-19 adalah penyesuaian tema RKP 2021 yang semula “Meningkatkan Investasi dan Daya Saing Industri Pariwisata” menjadi “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat”, penyesuaian tersebut dilakukan untuk merespon kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terdampak COVID 19 khususnya 40% populasi penduduk termiskin dan masyarakat berkebutuhan khusus.

Sampai saat ini BAPPENAS masih melakukan analisis pendalaman pada tema RKP 2022 karena tema akan sangat berkaitan dengan implementasi dan evaluasi RKP 2021. Namun dalam rangka persiapan penyusunan awal RKP 2022, kami tetap memerlukan masukan dari OMS sebagai *brainstroming* untuk

mengidentifikasi hal-hal strategis yang masih harus dilakukan dalam rangka percepatan pemulihan pasca COVID-19.

Diskusi tersebut akan dilakukan dalam bentuk webinar yang bertemakan arahan Presiden kepada Bappenas untuk dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional selain yaitu; Reformasi Sistem Kesehatan Nasional, Reformasi Sistem Perlindungan Sosial, Reformasi Ekonomi dalam Rangka Penanganan dan Pemulihan COVID-19, Reformasi Ketahanan Bencana Alam, Peningkatan Pencapaian Ekonomi Hijau melalui Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim.

Dalam webinar tersebut, Deputy Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan akan menyampaikan gambaran umum capaian kebijakan, tantangan, serta sektor strategis yang dirasa mampu menguatkan pemulihan pasca COVID-19 dalam RKP 2021 dan peran pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau. Kemudian 5 Deputy menjadi penanggung jawab untuk berdiskusi bersama perwakilan OMS dan peserta untuk membahas isu penting pada setiap reformasi sebagai bahan perumusan kebijakan mendatang.

Mengingat FKP akan dilakukan secara webinar, kami menyadari keterbatasan waktu yang ada sehingga tidak seluruh masukan OMS dapat kami tanggap secara langsung, untuk menjawab hal tersebut kami menyediakan website FKP sebagai sarana bagi OMS untuk dapat tetap memberikan masukan. Nantinya masukan tersebut akan secara langsung dikirim ke masing-masing Deputy terkait, selain itu OMS dapat memantau status dari masukan yang diberikan.

1.2. Tujuan

Adapun tujuan dari kegiatan ini antara lain:

1. Memberikan ruang kepada publik untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan pemerintah.
2. Memberikan ruang bahwa partisipasi publik yang bersifat lintas sektoral.
3. Membangun kepedulian dan rasa memiliki terhadap kebijakan pembangunan sehingga pembangunan nasional mencerminkan prinsip THIS.

1.3. Ruang Lingkup Kegiatan

Dalam rangka mendukung proses penyusunan rancangan awal RKP 2022 melalui pelaksanaan temu konsultasi publik maka ruang lingkup kegiatan yang

akan dilaksanakan antara lain: koordinasi, konsolidasi, analisis dan penajaman terhadap usulan tema, sasaran, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan pada RKP serta fasilitasi mekanisme partisipasi publik dalam rangka mewujudkan pencapaian prioritas pembangunan nasional. Kegiatan ini diharapkan menjadi dasar dalam penyusunan rancangan awal RKP oleh Bappenas.

1.4. Hasil yang Diharapkan

Melalui pelaksanaan kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat berupa:

1. Tersusunnya inventarisasi permasalahan yang mendasar dan rekomendasi publik terkait isu-isu strategis dalam prioritas nasional.
2. Terbangun komunikasi yang padu melalui pemanfaatan simpul jaringan stakeholder.
3. Terselenggaranya forum yang dapat menjembatani komunikasi antara pemerintah dengan stakeholder pembangunan.
4. Tersedianya portal *online* yang dapat menjadi sarana komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.

1.5. Pelaksana Kegiatan

Pelaksana kegiatan ini terdiri dari:

1. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan dan staf pendukung selaku penanggung jawab kegiatan.
2. Unit Kerja Eselon I dan II Bappenas, dalam koridor koordinasi dan konsolidasi.
3. *Stakeholder* pembangunan terkait, seperti Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), Lembaga Riset Perguruan Tinggi, Pusat Kajian, Asosiasi Profesi dan Pelaku Usaha.

BAB 2

PELAKSANAAN KEGIATAN

2.1. Mekanisme Kegiatan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik bersumber pada anggaran APBN tahun 2019. Adapun pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahunan dilakukan melalui mekanisme berikut; pra, saat, dan pasca pelaksanaan.

2.1.1. Pra Pelaksanaan

Untuk melaksanakan kegiatan Forum Konsultasi Publik Tahunan sebagaimana tahun-tahun berjalan, dilakukan persiapan-persiapan sebagai berikut:

- 1) Dengan kondisi COVID-19 di Indonesia, rencana awal Forum Konsultasi Publik telah revisi beberapa kali untuk menyesuaikan kondisi. Setelah dilakukan koordinasi dan pembahasan internal, telah disepakati Forum tersebut dilaksanakan secara daring.
- 2) Koordinasi dengan Direktorat Sektor terkait konsep pelaksanaan forum konsultasi publik. Tujuan dilakukan koordinasi ini adalah untuk meminta masukan dan dukungan baik substansi maupun teknis forum konsultasi publik.
- 3) Koordinasi dengan Direktorat Sektor dalam rangka meminta bahan dan ketersediaan menjadi narasumber untuk memaparkan isu yang menjadi fokus pembangunan pada tahun berikutnya.
- 4) Koordinasi dengan PIC Kedeputian Bidang untuk *briefing* tugas dan fungsi masing-masing.
- 5) Koordinasi dengan Moderator dan *Graphic Recorder* untuk teknis mekanisme pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.
- 6) Koordinasi dengan *Content Creator* untuk publikasi Forum Konsultasi Publik secara daring.

2.1.2. Pelaksanaan

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2022 diselenggarakan pada tanggal 27 Oktober 2020. Kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2022

- 1) Penyelenggaraan Forum konsultasi Publik dalam rangka menjaring masukan sebagai bahan dalam Rancangan Awal RKP 2022 dilakukan pada Hari Selasa, 27 Oktober 2020 dalam *Zoom Conference*.
- 2) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik tersebut mengundang sekitar 385 *stakeholders* yang terdiri dari perwakilan Bappenas, Pelaku Usaha dan Organisasi Masyarakat Sipil, Asosiasi Profesi, dan Perguruan Tinggi.
- 3) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik diawali dengan laporan pelaksanaan kegiatan dan penyampaian Capaian Program Pembangunan tahun sebelum (2018) dan tahun berjalan (TW III 2019).
- 4) Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik menyampaikan isu dan fokus pembangunan untuk tahun yang akan datang dari masing-masing Kedeputian di Bappenas.
- 5) Penjaringan masukan dilakukan secara langsung ditempat melalui Diskusi terbuka maupun *slido*, serta dilakukan melalui website Forum Konsultasi Publik setelah pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

2.1.3. Pasca Pelaksanaan

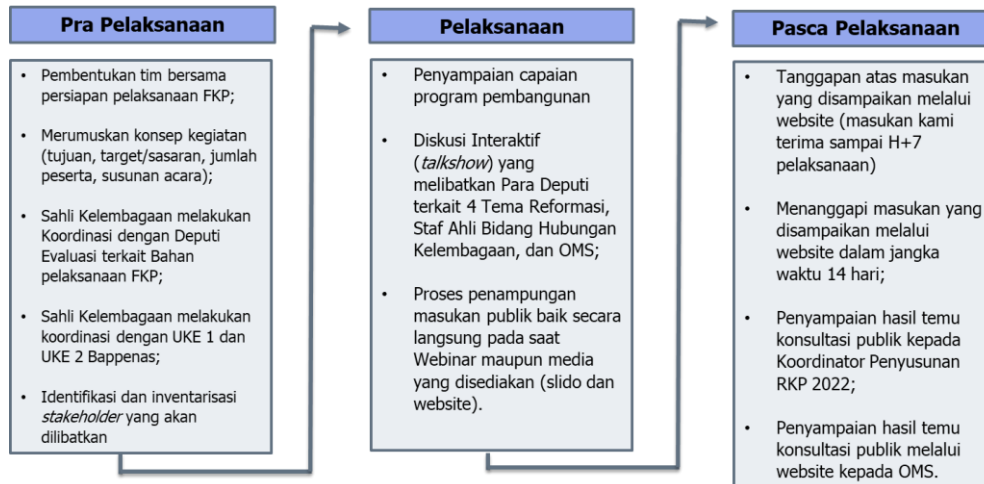
Pasca Pelaksanaan kegiatan dilakukan Evaluasi dan penyampaian hasil sebagai berikut:

Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah 2022

- 1) Pasca pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, penyampaian masukan dan pertanyaan masih diakomodasi melalui *website* Forum Konsultasi Publik yang terhubung langsung ke PIC Kedeputian di Bappenas untuk dijawab dan tindaklanjuti.
- 2) Hasil penyampaian masukan dan pertanyaan melalui *website* disampaikan dan dapat dipantau oleh Masyarakat secara terbuka.

- 3) Hasil Forum Konsultasi Publik disampaikan kepada Koordinator Penyusunan RKP untuk digunakan sebagai masukan dalam proses penyusunan Rancangan RKP 2022.

Gambar 1. Alur Proses Pelaksanaan FKP Tahun 2020



2.2. Metode Pengumpulan Data dan Informasi

Sebagai bagian dalam persiapan pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, pengumpulan data dan informasi merupakan hal yang harus dilakukan. Data dan informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Forum Konsultasi Publik antara lain:

1. Daftar Stakeholder yang akan diundang;

Forum Konsultasi Publik adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan melibatkan stakeholder pembangunan terkait yang bertujuan untuk merumuskan bersama apa yang akan menjadi prioritas dalam pembangunan Indonesia kedepan. Hal ini menjadi dasar pentingnya dilakukan inventarisasi stakeholder agar pelaksanaan kegiatan ini dapat menghasilkan masukan yang konkrit dan konstruktif.

2. Materi yang akan disampaikan;

Materi yang akan disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik juga merupakan hal yang penting dan harus dipikirkan bersama. Materi ini penting untuk mengarahkan peserta agar dapat memberikan masukan yang sesuai

dan sejalan dengan isu nasional dan prioritas pembangunan pada untuk tahun berikutnya.

3. Narasumber yang akan dilibatkan;

Pemilihan narasumber sangat penting untuk diperhatikan mengingat dalam diskusi akan terjadi komunikasi 2 (dua) arah antara pemerintah dengan peserta, sehingga dengan pemilihan Narasumber yang tepat, akan sangat membantu dalam kelancaran proses diskusi.

4. Mekanisme diskusi dan penjaringan masukan;

Metode diskusi yang tepat juga penting dalam menentukan keberhasilan sebuah kegiatan. Forum Konsultasi Publik diselenggarakan dalam rangka menjaring masukan peserta secara umum, bukan spesifik, sehingga pemilihan mekanisme diskusi akan membantu dalam pencapaian tujuan kegiatan.

5. Konsep penjaringan masukan pasca pelaksanaan Forum Konsultasi Publik.

Pasca pelaksanaan Forum Konsultasi Publik, peserta juga diharapkan masih dapat memberikan masukan melalui system informasi atau website. Oleh karena itu, konsep penjaringan masukan pasca pelaksanaan Forum Konsultasi Publik telah dilakukan inovasi dengan mengintegrasikan langsung kepada PIC masing-masing ke deputian.

2.3. Metode Analisis

Setiap masukan yang disampaikan oleh peserta akan diverifikasi dan diolah terlebih dahulu oleh Unit Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, setelah itu diteruskan kepada PIC masing-masing ke deputian untuk dijawab dan ditindaklanjuti.

BAB 3

HASIL PELAKSANAAN

KEGIATAN

3.1. Proses Pelaksanaan Kegiatan

3.1.1. Gambaran Umum

A. Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022

Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022 dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020 yang telah dilaksanakan dalam *Zoom Conference* secara *Live* dan juga di *Youtube*. Kegiatan FKP ini dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan input dan masukan untuk rancangan awal RKP 2022.

Pelaksanaan FKP penyusunan RKP 2022 dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat yang diwakili oleh beberapa perwakilan dari Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Kegiatan ini juga dihadiri oleh Bapak Menteri Kementerian PPN/Bappenas sebagai pembuka acara, Unit Kerja Eselon 1 dan Unit Kerja Eselon 2 Bappenas.

Dalam sambutannya, Menteri Kementerian PPN/ Kepala Bappenas menyampaikan dukungannya untuk kesuksesan kegiatan ini terutama dalam mewadahi aspirasi masyarakat. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Bapak Surharso Monoarfa selaku Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui *videotaping*. Dalam arahannya beliau menyampaikan harapan yang besar kepada peserta agar dapat memberikan masukan yang nyata dan konstruktif sehingga tujuan dari kegiatan ini dapat tercapai dengan baik. Forum ini dihadiri oleh 385 orang yang merupakan perwakilan dari Direktorat Sektor Bappenas, Pemerintah Daerah, Organisasi Masyarakat Sipil, Asosiasi Profesi, Asosiasi Pelaku Usaha, dan Lembaga Riset Perguruan Tinggi.

Dalam Pelaksanaannya, Forum Konsultasi Publik dibagi dalam 3 (tiga) sesi, sesi pertama yaitu Pleno (Pembukaan) yang dilanjutkan dengan paparan terkait Capaian Pembangunan Tahun 2020 Triwulan II, serta Pokok-pokok dalam RKP Tahun 2021. Sesi kedua yaitu tanggapan dari 5 Lembaga Swadaya Masyarakat pada tiap Bidang Reformasi.

Sedangkan sesi ketiganya adalah sesi diskusi tanya jawab dengan Deputi dan Direktur tiap bidang Reformasi yang dipandu oleh MC/Moderator.

Saat diskusi berlangsung, terlihat bahwa peserta begitu antusias dalam mengikuti kegiatan, banyaknya pula mahasiswa yang hadir untuk meramaikan. Selain peserta, fasilitator dan perwakilan kedeputusan juga sangat semangat dalam diskusi, sehingga terjalin komunikasi 2 (dua) arah yang cukup baik. Dalam sesi diskusi, juga disampaikan pula bahwa masukan atau tanggapan yang tidak terakomodasi selama pelaksanaan FKP, dapat disampaikan melalui web portal yang telah disediakan oleh Penanggung Jawab FKP.

Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik didapat pertanyaan dan masukan dari peserta yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- Pada sesi tanya jawab langsung beberap pertanyaan peserta yang sudah dijawab langsung seperti contohnya:
 1. Pertanyaan: Melihat keseriusan Pemerintah dalam mengikutsertakan masyarakat, misal ormas (Muhammadiyah), seharusnya dapat dilihat dari besaran dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut. Namun, yg terjadi adalah tidak ada anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan kerjasama ini. Kapan ormas diajak keterlibatannya? Dan ada dimana anggaran APBN tahun depan terkait reformasi kesehatan (penguatan puskesmas, perbaikan BPJS dan JKN)
 2. Kemudian, Bappenas harus mampu mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yg ada dengan melibatkan masyarakat, yg terjadi adalah jika sudah ada suatu kejadian baru terlihat ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Banyak sektor informal yang belum terlibat dalam pelaksanaan pembangunan.
- Disampaikan jawaban oleh Bapak Eka Chandra Buana, SE, MA selaku Direktur Perencanaan Makro dan Analisa Statistik, Bappenas: Terkait Covid-19, terdapat pelebaran anggaran, kebijakan fiskal didorong Pemerintah untuk pemulihan perekonomian nasional.

Anggaran untuk Covid-19 cukup besar yang merupakan fokus pemerintah dalam jangka pendek.

- Disampaikan juga jawaban oleh Ibu Dr. Ir. Boediasuti Ontowirjo, MBA selaku Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Bappenas:

Secara garis besar, peran pemerintah dalam melibatkan masyarakat, salah satunya adalah dengan dilakukannya Forum Konsultasi Publik (FKP) dimana FKP merupakan salah satu wadah yg dilakukan Pemerintah yang bertujuan dalam menjaring masukan masyarakat dalam penyusunan rancangan awal rencana pemerintah (RKP)

Kemudian, terdapat 41 *major project* yg terdapat dalam RPJMN 2020-2024, bukan hanya melibatkan dana APBN, namun melibatkan dana pemda, swasta untuk turut berkontribusi dalam pembangunan, dari sisi anggaran belanja. Dari sisi indikator, RKP 2021 menekankan pada kinerja pada masing-masing unit instansi.

Sehingga dari pemerintah datanya akuntabel, transparan, dan dapat dipantau oleh masyarakat dalam prosesnya.

- Pada sesi akomodasi masukan melalui website Forum Konsultasi Publik, didapat hasil sebagai berikut:

a. Pendidikan

- Metode belajar dari rumah telah memperlihatkan kesenjangan digital di Indonesia yang berpotensi memperburuk ketimpangan belajar di kalangan siswa semasa pandemi. Hal ini penting untuk memaksimalkan pemanfaatan Palapa Ring dalam mendukung konektivitas lintas daerah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Agama (Kemenag), dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) harus bekerja sama dan melibatkan pihak swasta dalam upaya melengkapi sekolah-sekolah dengan koneksi internet, fasilitas TIK, dan pengembangan keterampilan untuk para guru.
- Bappenas sebaiknya memperhatikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan cara meningkatkan ketahanan fasilitas penitipan anak dan menambah jumlah fasilitas. Saat ini, fasilitas untuk PAUD masih terbatas, sementara bukti menunjukkan bahwa PAUD tidak

hanya mendukung pendidikan dan perkembangan anak, akan tetapi juga mendukung partisipasi angkatan kerja perempuan.

b. Kebencanaan

- Sesuai paparan dari perwakilan Kedeputian Regional, mengambil pelajaran dari Jepang dalam mengatasi isu perubahan iklim adalah langkah yang bagus, akan tetapi, harus juga disinkronisasikan dengan konteks lokal. Di Indonesia, pemahaman umum mengenai pengurangan risiko bencana antara pemerintah pusat dan daerah masih kurang baik dalam pelaksanaannya. Beberapa kementerian yang memiliki mandat penanganan bencana juga memiliki prosedur dan ketentuannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu, “rencana induk terpusat” dalam manajemen risiko bencana di Indonesia harus diperjelas.

c. Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air

- Undang-Undang Cipta Kerja juga menghapus ketentuan pada pengelolaan kebakaran hutan di perkebunan. Bappenas harus menjamin bahwa regulasi teknis yang berkaitan akan tetap memiliki persyaratan pengelolaan dan pencegahan kebakaran di perkebunan.

d. Ketahanan Pangan dan Pertanian

- Untuk meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP), Bappenas harus mengatasi biaya masukan yang mahal, salah satunya dengan membuka akses terhadap benih padi hibrida. Bagi para petani, padi hibrida berpotensi meningkatkan pemasukan bersih sekitar Rp 15-20 juta per hektar. Hal ini juga dapat membantu petani terekspos dengan teknologi modern. Secara makro, peningkatan produktivitas padi hibrida akan meredakan gejolak harga yang disebabkan oleh rendahnya suplai dari beras, dan oleh karena itu, dapat meningkatkan keamanan pangan di Indonesia. Ini dapat ditelusuri secara lebih rinci pada <https://repository.cips-indonesia.org/media/287925-expanding-hybrid-rice-production-in-indo-479731ff.pdf>. Rencana apa yang akan dilakukan pemerintah pusat untuk memastikan bahwa pemda ikut melaksanakan implementasi SDG di daerahnya masing-masing? Sementara faktanya masih banyak ketidakpastian hukum yg terjadi

di daerah, contohnya tumpang tindihnya alat bukti surat kepemilikan tanah, strategi apa yang tepat?

- Impor benih padi hibrida harus diakui sebagai kebutuhan jangka pendek untuk menyediakan varietas yang mungkin sesuai dengan kondisi tertentu di berbagai wilayah tertentu di Indonesia. Hal ini harus dilakukan melalui kemitraan dengan pihak swasta, terutama perusahaan yang mungkin sudah memiliki stok induk yang sesuai untuk dikeluarkan atau untuk pengembangan lebih lanjut, baik di dalam perusahaan multinasional maupun perusahaan lokal. Untuk mengurangi ketergantungan pada impor benih, pemerintah harus memberikan insentif kepada perguruan tinggi lokal untuk mengembangkan pusat penelitian padi hibrida baru, serta sumber daya manusia yang dibutuhkan.
- Kemitraan dengan pihak swasta juga dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas atau pendapatan petani. Studi CIPS menunjukkan kemitraan dengan pihak swasta dapat meningkatkan produktivitas petani hingga dua kali lipat dari petani biasa dan meningkatkan harga jual. Pihak swasta yang membantu petani mendapatkan akses ke modal maupun membagi pengetahuan sistem budidaya pertanian berkelanjutan atau teknik pertanian yang lebih berkelanjutan, sehingga petani dapat menikmati peningkatan pendapatan karena peningkatan produktivitas dan nilai jual.
- Salah satu prioritas Bappenas dalam peningkatan akses, ketersediaan, dan kualitas konsumsi pangan adalah peningkatan tata kelola sistem pangan nasional lewat pengembangan sistem resi gudang. Untuk mengatasi minimnya implementasi sistem resi gudang di Indonesia, pemerintah dalam hal ini Bappenas bekerja sama dengan Bappebti harus turun tangan secara ekspansif terutama dalam mensosialisasikan mengenai program ini ke petani. Kerja sama dengan pemerintah daerah tentu perlu ditingkatkan agar para kepala desa juga turut ikut serta terlibat dalam optimalisasi sistem resi gudang. Selain itu, dari sisi penyediannya, lembaga pembiayaan dan pengelola gudang juga harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin agar pelaksanaannya berjalan lancar. Pengelola gudang haruslah pihak yang paham akan

jalannya suatu usaha, tidak sekadar menjaga gudang. Untuk itu, perekrutan pengelola gudang harus dilakukan untuk mereka yang benar-benar berkapasitas.

e. UMKM

- Sesuai pernyataan dari Direktur Kemiskinan dan Bapak Berli dari INDEF, membangun *database* sangat penting dalam membentuk intervensi yang efektif untuk perkembangan UMKM. Terutama dalam masa pandemi ini, *database* UMKM menjadi kata kunci dalam pemberian bantuan sosial, yang kemudian diperkuat amanatnya melalui UU Cipta Kerja. Meskipun begitu, sampai saat ini tidak ada informasi mengenai bagaimana pemerintah mengelola data UMKM. Sebagai contoh, data yang mana yang telah dikumpulkan? Bagaimana sistemnya? Siapa yang mengelolanya? Apakah ini terbuka untuk publik? Seberapa baru datanya?
- Pemerintah harus mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan *marketplace* untuk melakukan estimasi terhadap data UMKM contohnya meliputi komoditas, transaksi, dan sebagainya.
- Pemerintah perlu mempertimbangkan data agregat berdasarkan gender pada UMKM, terutama di tingkat mikro agar dapat mendesain intervensi yang spesifik pada bisnis mikro yang dimiliki oleh kalangan perempuan.

f. Ekonomi Digital

- Bappenas harus mempertimbangkan reformasi kebijakan dalam melakukan dialog publik-swasta (*public-private dialogue* atau PPD) untuk dimasukkan ke dalam RKP 2022. Hal ini untuk mengatasi isu terhadap inklusi *multi-stakeholders* karena kerangka peraturan saat ini berpotensi menghambat inovasi teknologi dan menciptakan lebih banyak 'kesenjangan' digital di antara bisnis (contohnya bisnis mikro dan kecil vs. bisnis besar) dalam proses perumusan kebijakan.

g. Pariwisata

- Segera melakukan perlindungan dan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang

Penataan Ruang di Kawasan Cagar Budaya Candi Plaosan. Hal ini dikarenakan:

- Adanya indikasi pelanggaran terhadap zona tata ruang lindung kawasan cagar budaya Candi Plaosan yang dilakukan oleh, Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, Pemerintah Desa Bugisan dan individu yang membangun di kawasan lindung cagar budaya.
- Adanya indikasi pembiaran terhadap pelanggaran tersebut yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten.
- Adanya indikasi keterlibatan alat negara TNI/Polri berpangkat perwira tinggi sehingga penegakan aturan tidak berjalan dengan baik.

3.2. Rencana Tindak Lanjut

Pasca pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tematik dan Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2022, beberapa hal yang kami lakukan antara lain:

1. Mematangkan konsep pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang akan datang secara keseluruhan, baik itu Forum Konsultasi Publik Tematik yang disesuaikan dengan isu pada masing-masing regional I, II, dan II. Forum Konsultasi Tematik dimaksudkan untuk mengidentifikasi masalah secara bottom up sehingga lebih tepat sasaran. Selain itu Forum Konsultasi Publik Tahunan akan tetap dilaksanakan seperti biasanya. .
2. Melakukan optimalisasi dan pengenalan website Forum Konsultasi Publik kepada public agar masukan dan aspirasi Masyarakat dalam pembangunan nasional dapat terjaring secara maksimal.
3. Melaporkan hasil Forum Konsultasi Publik kepada Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah 2021.
4. Melakukan penyesuaian kembali Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Forum Konsultasi Publik sebagaimana evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.



*Kementerian PPN/
Bappenas*

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2022 didapatkan hasil sebagai berikut:

- Penyampaian satu kata kunci pembangunan untuk rancangan awal tema RKP 2022, yang mengerucut pada kata utang negara, reformasi regulasi, satu data, kesehatan, pendidikan hukum, reformasi perlindungan sosial, reformasi regulasi, pekerjaan, bencana, dll.
- Masukan yang diperoleh sebagai bahan rancangan awal RKP masih banyak yang berbentuk pertanyaan bukan masukan, sehingga masih sulit untuk diakomodir sebagai bahan awal penyusunan rema RKP 2022.
- Pemanfaatan website forum konsultasi publik yang terintegrasi dengan PIC kedeputan bidang sudah terlaksana, meskipun belum optimal.
- Mengingat Forum Konsultasi Publik dilaksanakan saat pandemic COVID-19, sehingga rencana awal untuk melaksanakan Forum Konsultasi Publik Tematik pada masing-masing Regional I, II, III tidak dapat dilaksanakan. Selain itu pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Tahunan juga tidak dapat digelar secara tatap muka seperti tahun-tahun sebelumnya.

4.2. Saran

Dari pelaksanaan kegiatan Forum Konsultasi Publik tahun anggaran 2020 disampaikan saran dan rekomendasi untuk pelaksanaan Forum Konsultasi Publik mendatang sebagai berikut:

- Penegasan terhadap *timeline* pelaksanaan yang sudah ditetapkan, sehingga persiapan dapat lebih optimal. Diharapkan bahwa pada tahun 2021 kondisi pandemi COVID-19 sudah lebih baik sehingga Forum Konsultasi Publik dapat dilakukan sesuai rencana.
- Penyebaran undangan dan bahan kepada peserta minimal 3 (tiga) minggu sebelum pelaksanaan, sehingga banyak peserta yang dapat hadir untuk memberikan masukan yang sesuai harapan.
- Mengingat bahwa peserta Forum Konsultasi Publik lebih tertarik untuk bertanya dibandingkan memberikan masukan terhadap rancangan awal

tema RKP 2022, maka diperlukan hints untuk selalu mengingatkan peserta guna memberikan masukan pada saat acara berlangsung.

DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran 1

Dokumentasi Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik 2020 secara Daring dalam Zoon Conference.



2. Lampiran 2

Hasil Notulensi Forum Konsultasi Publik

NOTULENSI

Webinar: Forum Konsultasi Publik (FKP) dalam rangka Penyusunan Rancangan Awal RKP Tahun 2022

Zoom Meeting, Jakarta, Selasa 27 Oktober 2020

Sambutan oleh Laporan Ketua Penyelenggara FKP oleh Bu Diani, Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Bappenas:

- FKP pada dasarnya merupakan **bentuk dari keterbukaan pemerintah (*open government*)** dan juga merupakan bagian dari **pelaksanaan demokrasi**
- *Open Government* dapat dikatakan sebagai wujud komitmen Indonesia pada *forum open government internasional*, bersama organisasi non pemerintah atau yang biasa disebut *open government partnership*
- Pelaksanaan FKP bertujuan untuk mendapatkan **saran masukan** dalam rangka **Rancangan Awal RKP Tahun 2022**
- FKP hari ini lebih menitikberatkan pada Capaian Pembangunan Tahun 2020 Triwulan II dalam RKP 2020 serta pokok-pokok dalam RKP 2021 yakni **“Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat”**.
- Besar harapan agar para peserta dapat berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan sehingga masyarakat memiliki *ownership* terhadap proses perencanaan dan pembangunan nasional, khususnya dengan RKP 2022.
- Pertemuan FKP ini mengundang lebih dari 200 *stakeholders* yang terdiri dari OMS, Asosiasi Profesi, Pusat Kajian, dan Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia.

Penyampaian *Keynote Speech* oleh Bapak Menteri PPN/Kepala Bappenas

- Saya menyambut baik acara FKP dalam rangka penyusunan rancangan awal RKP 2022, bukan hanya karena Pasal 2 ayat (4) huruf d, UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) memerintahkan demikian, namun saya melihat FKP dalam setiap proses atau rencana penyusunan kebijakan Pemerintah memang seharusnya disampaikan kepada publik untuk memperoleh pemikiran yang lebih baik lagi
- Tuntutan *new normal* atau adaptasi kebiasaan baru, model dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional (pusat dan daerah) pada tahun 2021, 2022 dan selanjutnya seharusnya dapat lebih **agile** dan **dinamis**, mengikuti kebutuhan di dalam masyarakat

- Penting untuk **merubah pandangan** atau **paradigma pembangunan** yang semula bersifat *Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous* ke arah *Visioning, Understanding, Clarity, dan Agile (new VUCA)*. Semangat *new VUCA* tersebut seharusnya menjadi bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional kedepan.
- Pandemi Covid-19 juga menuntut Bappenas melakukan *big adjustment* dengan **perubahan prioritas pada RKP 2021** yang semula “Peningkatan Investasi dan Daya Saing Industri Pariwisata” diubah menjadi “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat”.
- Sesuai perintah Bapak Presiden kepada untuk menjadikan Bappenas sebagai “**Clearing House**” perencanaan pembangunan, dimana pada intinya adalah untuk **memastikan pencapaian target-target RKP** secara konsisten, tidak hanya “send” tetapi juga “delivered”.
- Pelaksanaan kebijakan oleh K/L sesuai 4 arahan Bapak Presiden, terfokus pada penanganan dan pemulihan Covid-19, yaitu; **Reformasi Kesehatan Nasional, Reformasi Perlindungan Sosial, Reformasi Ekonomi, Reformasi Ketahanan Bencana**, dan didukung oleh **Peran Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon sebagai Sektor Strategis Masa Depan**.
- Diharapkan diskusi FKP yang dilakukan saat ini dapat bermanfaat untuk pembangunan bangsa dan negara yang lebih baik lagi.

Paparan oleh Deputi Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian PPN/Bappenas

Dr. Ir. Taufik Hanafi

- Acara FKP 2021 nampaknya lebih sukses dari yg sebelumnya karena dapat mendatangkan audiens atau peserta yg lebih banyak daripada FKP tahun sebelumnya ketika sebelum kondisi pandemi
- Saat ini RKP 2021 telah dilakukan penyempurnaan
- RAPBN 2021 telah disetujui oleh DPR
- Sasaran pembangunan Indonesia 2020 sebelum dan sesudah COVID-19 terkoreksi cukup dalam, misal: pertumbuhan ekonomi sebelum covid-19: 5,3, saat covid-19: (1,1)-0,2
- Highlight capaian **PN 1 Pembangunan Manusia:**
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) capaian 2019: 71,92, dimana target Des 2020: 72,51
Gini Ratio capaian maret 2020: 0,381, dimana target des 2020: 0,375-0,380
- Highlight capaian **PN 2 infrastruktur dan pemerataan wilayah:**
Persentase rumah tangga yg menempati hunian dengan kecukupan luas lantai perkapita 2019: 91,62, target 2020: 92,72
- Highlight capaian **PN 3 Nilai Tambah Sektor Riil, Industrialisasi & Kesempatan Kerja:**
Pertumbuhan PDB Pertanian capaian 2,19%, target 3,7%
Pertumbuhan Investasi capaian -8,61% dimana targetnya adalah 6,0%
- Highlight capaian **PN 4 ketahanan pangan, air dan LH:**
Produksi Jagung: capaian 16,38jt ton, target 30,9 jt ton
Indeks Kualitas Air capaian 52,05 dimana target 55,1

- Highlight capaian **PN 5 ketahanan pangan, air dan LH:**
Indeks Perilaku Anti Korupsi, capaian 3,84 dimana targetnya adalah 4
- RKP 2020 belum disusun berdasarkan RPJMN 2020-2024, karena merupakan masa peralihan dari periode RPJMN sebelumnya, sehingga Prioritas Nasional (PN) masih berjumlah 5 dimana RPJMN 2020-2024 memiliki 7 Fokus Pembangunan
- **Tema RKP 2021** adalah Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial
- **Pertumbuhan Ekonomi** pada tahun 2021 disepakati di angka: 5,0%
- **Gini Ratio** target th. 2021: 0,377 – 0,379
- Di RKP 2021 ada hal menarik untuk diangkat yaitu dimasukkan target **Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Nelayan (NTN)** sebesar 102-104 di tahun 2021
- RKP 2021 berbeda dengan konsep tahun sebelumnya, dalam FKP sebelumnya belum pernah ditampilkan dengan rinci, dimana th.2021 terdapat beberapa **major project dalam prioritas nasional**
- Strategi Pemulihan Pasca Pandemi Covid-19 pada RKP 2021, tahun 2021 merupakan tahun percepatan pemulihan ekonomi serta akan dilakukan reformasi di bidang kesehatan, sosial dan ketahanan bencana
- Terkait Reformasi Sistem Kesehatan, kebutuhan akan vaksin, uji laboratorium, pemanfaatan obat, riset vaksin merupakan beberapa fokus penting pemerintah khususnya di era pandemi saat ini.
- Dalam melakukan reformasi perlu dilihat perspektif yg lebih panjang, sehingga diperlukan trayektori, dimana **th.2021 dimulai dengan pemulihan kondisi ekonomi, 2022 perbaikan mekanisme menyeluruh, 2023 penguatan integrasi, dan 2024 denegan fokus akselerasi penurunan kemiskinan.**
- **Ekonomi Hijau** tidak selalu ditujukan untuk pencapaian pertumbuhan ekonomi saja, **namun** bagaimana dapat menyerap banyak tenaga kerja dengan membangun energi berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan konsep lingkungan.
- Terkait **Reformasi Ketahanan Bencana**, tidak hanya terkait bencana alam yg diperhatikan, namun yang sangat penting dalah penguatan ketahanan nasional terhadap bencana yg sifatnya non-alam.

SESI TANGGAPAN

Tanggapan Bpk Ede Surya D.

Ketua Ikatan Kesehatan Masyarakat Indonesia

- Public health memang merupakan tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah
- Harapan WNI di Indonesia adalah lahir dengan kondisi sehat, hingga tua pun diharapkan tetap dalam kondisi yang sehat
- Langkah **preventive focused** yg penting untuk dilakukan adalah: promosi kesehatan, perlindungan khusus, diagnosis dini, pembatasan kecatatan & rehabilitasi

- Setiap individu & keluarga penting untuk dibangun kesadaran akan perilaku hidup bersih dan sehat
- Bagi Pemerintah Indonesia penting untuk memakai **data kesehatan sebagai dasar kebijakan** (*evidence based policy*).
- Pengaruh Covid-19 mengajarkan pemerintah untuk lihai dalam melakukan *tracing* penularan, dan masyarakat tertib untuk melakukan gerakan 3M (menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan)
- Dalam era pandemi, pemerintah-nakes-masyarakat harus selalu menerapkan fokus pada **Preventive, Protection** dan **Response** di tiap aksinya.
- Terkait Sistem Kesehatan Nasional (SKN) Indonesia kedepan (**transformasi SKN menuju public health 4.0**), paling penting untuk dilakukan perubahan pada pelayanan kesehatan primer yaitu dengan melakukan **transformasi puskesmas**, penguatan kapasitas puskesmas, perjelas upaya kesehatan perorangan, dan juga dilakukan digitalisasi pada pelayanan kesehatan
- Terdapat **3 komponen** yang harus Pemerintah perhatikan dalam **Health System Reform** (HSR): 1) Harus selaras dengan kemajuan atau perubahan pada 3 komponen (services, environment (risk) dan society readiness); 2) *Health System (Services)* harus seiring dengan tingkat perubahan Lingkungan (Risk) dan juga Kesiapan Masyarakat; dan 3) Pemerintah harus mampu mengharmonisasikan/mengorkestrakan “*orchestrating*” sektor kesehatan dan juga sektor lainnya.

Tanggapan Ibu Athia Yumna (SMERU)

- **Dampak dari Covid-19** adalah lahirnya **kelompok rentan** atau miskin yg baru, disamping kelompok miskin yg lama semakin banyak dan terguncang secara lebih dalam
- **Data sangat penting** untuk dapat memantau guncangan baru (*new shock*) kelompok miskin, dimana pembaharuan *database* tersebut belum terupdate di data perlindungan sosial yg ada saat ini
- *Lack of data* ini merupakan **permasalahan koordinasi** antara pemerintah pusat dan pemerintah di tiap daerah
- Berdasarkan studi yg kami lakukan, terkait peran koordinasi di daerah, **tidak semua daerah** tersebut **memperbaharui database mereka**, padahal hal tersebut merupakan salah satu amanat dari PUU (terjaminnya kesejahteraan masyarakat).
- **Bansos untuk disabilitas dan lansia** porsi bantuannya **masih sangat minim**, padahal mereka adalah kelompok yang paling rentan untuk diberi bantuan.
- 3 elemen yaitu: **Social Protection, Climate Change Adaption, dan Disaster Risk Reduction**, merupakan **tantangan yg sangat besar** bagi pemerintah dalam mengintegrasikan dan mengharmonisasikannya.

- **Digitalisasi sangat penting hal penguatan data**, namun, Indonesia sendiri masih memiliki permasalahan terkait digital literasi dan juga terkait kelembagaannya, yakni langkah seperti apa yg dilakukan pemerintah dalam penyelesaian permasalahan data ini?
- *Social Protection* tidak bisa dipisahkan dari jangkauan pelayanan dasar
- Studi SMERU mengindikasikan bahwa **jaminan sosial lebih relate dalam mengurangi kemiskinan**, namun, tidak berimpact pada pengurangan ketimpangan di masyarakat.
- *New Shock* mengharuskan pemerintah Indonesia untuk selalu beradaptasi dengan melakukan penyesuaian sistem.

Tanggapan Bpk. Berly

Research Director, INDEF

- **Good practice terkait Covid-19 di Indonesia:** testing rate tinggi di Sumbar, Kaltim & Papua Barat serta Jakarta, bantuan untuk penduduk yg kerja di Jabodetabek supaya tidak mudik dari pemprov Jateng, mikro detection dan karantina di Surabaya dan inisiatif masyarakat sipil di Jogja dalam pencegahan Covid-19 (sonjoo)
- Program bantuan 12jt UMKM sebesar 2,4jt, namun, berapa banyak UMKM yg tercatat perlu diperhatikan, sehingga dalam **pembaruan database** perlu kerjasama dengan pemda, univ, dan LSM, karena banyak usaha (UMKM) yg base nya dirumah dan tidak berbentuk bahan usaha
- Perlu dorongan dari sisi demand dengan pencarian *cash transfer* program jamsos dan tunjangan (khususnya untuk nakes)
- Pemerintah perlu **memberi pendampingan** untuk berjualan lewat digital market place dan social media, bukan hanya di tingkat lokal/nasional namun dapat juga menembus go international
- **Masukan untuk RKP 2022:**
 - *Target protection* dan stimulus untuk sektor transportasi dan perhubungan serta hotel & restoran
 - Perlindungan anak dan gizi, sangat penting untuk menghindari *lost generation*
 - Penguatan database 50% penduduk yaitu nama, alamat, no.HP dan rekening bank, yg harus selalu diupdate
 - Database UMKM dilakukan penguatan, yg merupakan amanat UU CK Pemerintah, salah satunya yakni dengan memberikan stimulus
 - Pemerintah juga fokus ke arah energi terbarukan di daerah-daerah terpencil

Tanggapan Bpk Ibnu Hajar

Presiden Aksi Cepat Tanggap (ACT)

- Dalam konteks kebencanaan, penanganannya akan jauh lebih dapat terintegrasi jika fokus Pemerintah sudah dilakukan dari **tahap pencegahan**.

- Karena nyatanya, semua *resources* baru dikerahkan ketika terjadinya bencana, sehingga memang terlihat jelas bahwa masyarakat dan pemerintah Indonesia tidak ada kesiapan sebelumnya, sehingga timbulah banyak korban jiwa.
- **Contingency Plan** yang penting adalah **pembagian tugas**. Pemerintah harus dapat membagi tugas dan turut melibatkan *stakeholder* bukan hanya instansi pemerintah saja, tapi non-gov yang memang *handling* terkait ketahanan bencana
- Pemerintah harus cepat tanggap tidak hanya ketika kondisi *emergency* saja
- **Pelatihan, sertifikat siaga bencana**, sangat penting untuk difokuskan untuk langkah mitigasi atau preventif, bukan hanya ketika kondisi *emergency*.
- Penting agar masyarakat juga disiapkan untuk ***preparation mitigation disaster***
- Ketika tsunami di Palu, pemerintah kabkota ternyata tidak ada memberi sosialisasi terkait bencana sehingga menimbulkan banyak korban.
- Pemerintah harus melakukan **riset potensi bencana** dan penting untuk **melakukan sosialisasi hasil riset tersebut kepada publik**, dan **masyarakat disiapkan untuk mitigasi bencana**.
- Fokus kami adalah kepada ***proses mitigation*** dan ***preparation disaster*** serta **keterlibatan semua instansi pemerintah dalam mitigasi plan**, banyaknya yg terjadi adalah instansi memiliki keterlibatan peran dalam perencananya, namun tidak melakukan hal tersebut atau tidak optimal ketika terjadi bencana, dan tak kalah penting adalah kurangnya persiapan masyarakat ketahanan bencana.
- Pemerintah jangan hanya fokus pada kesehatan saja, namun penting untuk memperhatikan isu sosial yg terjadi di tengah masyarakat.

Tanggapan Dr.Nirarta Samadhi

Country Director WRI Indonesia

- Respon negara-negara, termasuk indonesia masih bersifat konvensional, **belum banyak menekankan pada ekonomi berkelanjutan atau ekonomi hijau**. Hal ini berpotensi mengakibatkan adanya lonjakan emisi setelah pandemi berakhir
- Kebijakan fiskal 2021 tidak menekankan ekonomi berkelanjutan dari rendah karbon walaupun *micro indicators* pembangunan nasional salah satunya adalah emisi GRK
- Sudut pandang yg lebih luas akan adanya COVID-19 yakni memberi kesempatan pada pemerintah untuk dapat menuju **strategi “*build back better*”** dan **pembangunan rendah karbon**
- Konvergensi krisis perlu ditangani melalui konvergensi solusi yang terintegrasi, holistik, dan tidak silo, sehingga tercipta pola pembangunan yang tepat dan berkelanjutan sehingga memberikan peluang untuk membangun kehidupan yang baik dan berketahanan dengan prinsip *Fairer, Stronger, Safer, dan Cleaner*.
- Contoh kebijakan pembangunan rendah karbon dan ekonomi hijau di daerah yang dapat direplikasi: misal Bali, Lombok, dan deklarasi manokwari dan perdasus papua barat

- **Rekomendasi kebijakan untuk penyusunan RKP 2022:**

1. RKP 2022 perlu memuat strategi pemulihan yg lebih baik pasca pandemic COVID dengan tetap mengacu pada Strategi Pembangunan Rendah Karbon dalam RPJMN 2020-2024
2. Meningkatkan alokasi pendanaan dan stimulus fiskal pada pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim
3. Membangun ketahanan untuk menghadapi “guncangan” selanjutnya

SESI TANYA JAWAB

Q: Bpk. Isono Akatiga:

Melihat keseriusan Pemerintah dalam mengikutsertakan masyarakat, misal ormas (Muhammadiyah), seharusnya dapat dilihat dari besaran dana yang dianggarkan untuk kegiatan tersebut. Namun, yg terjadi adalah tidak ada anggaran yang diperuntukkan untuk kegiatan kerjasama ini. Kapan ormas diajak keterlibatannya? Dan ada dimana anggaran APBN tahun depan terkait reformasi kesehatan (penguatan puskesmas, perbaikan BPJS dan JKN)

Kemudian, Bappenas harus mampu mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yg ada dengan melibatkan masyarakat, yg terjadi adalah jika sudah ada suatu kejadian baru terlihat ketidakmampuan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Banyak sektor informal yang belum terlibat dalam pelaksanaan pembangunan.

A:

Tanggapan Bpk Eka Chandra Buana, SE, MA, Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Bappenas:

Terkait Covid-19, terdapat pelebaran anggaran, kebijakan fiskal didorong Pemerintah untuk pemulihan perekonomian nasional. Anggaran untuk Covid-19 cukup besar yang merupakan fokus pemerintah dalam jangka pendek.

Ibu Dr. Ir. Boediastoeti Ontowirjo, MBA, Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Bappenas

Secara garis besar, peran pemerintah dalam melibatkan masyarakat, salah satunya adalah dengan dilakukannya Forum Konsultasi Publik (FKP) dimana FKP merupakan salah satu wadah yg dilakukan Pemerintah yang bertujuan dalam menjaring masukan masyarakat dalam penyusunan rancangan awal rencana pemerintah (RKP)

Kemudian, terdapat 41 *major project* yg terdapat dalam RPJMN 2020-2024, bukan hanya melibatkan dana APBN, namun melibatkan dana pemda, swasta untuk turut berkontribusi dalam pembangunan, dari sisi anggaran belanja. Dari sisi indikator, RKP 2021 menekankan pada kinerja pada masing-masing unit instansi.

Sehingga dari pemerintah datanya akuntabel, transparan, dan dapat dipantau oleh masyarakat dalam prosesnya.

Q:

Ibu Shorea, Univ Widya Gama, Samarinda:

Strategi pembangunan apa yang bisa diusung oleh pemerintah terhadap masyarakat local terkait perlindungan masyarakat lokal didaerah perbatasan?

A:

Tanggapan Bpk. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D, Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Bappenas:

Di daerah perbatas terdapat afirmatif dimana instansi pemerintah melakukan pendekatan pelayanan dasar misalnya berupa Pendidikan, Air Bersih, Fasilitas Kesehatan, dimana Pempus juga mengharapkan peran serta keterlibatan Pemda dan Pemkot/Kab dalam meningkatkan pelayanan kesehatan dan peningkatan kemampuan masyarakat di daerah perbatasan tersebut.

Q:

Dr. Mukhlis, S.E., M.Si - Reformasi Ekonomi

Menyoroti implikasi program dana desa. Apakah kehandalan tenaga pendamping/pelaku pembangunan terutama pada tingkat akar rumput cukup memahami terhadap sasaran pembangunan berdasarkan indikator2 penting dari prestasi kegiatan ekonomi?

Mengingat, hasil pembangunan bersifat produktif, multiplier effect hemat saya relatif rendah terutama di daerah perdesaan pedalaman. Indikator capaian ekonomi tidaklah cukup hanya dengan output dari sisi realisasi nominal anggaran.

Bagaimana dengan indikator impact dan feedback dari hasil pembangunan bersumber dana desa? Mengingat kedua indikator ini perlu diperhatikan guna mengurangi ketergantungan fiskal (artinya, stimulus ada masa limit tertentu sesuai rencana). Kiranya, distribusi dan pengalokasian anggaran dana desa proporsional dg keberaaan sumber daya pelaku agar penggunaan menjadi efektif dan efisien.

A:

Tanggapan Bpk. Drs. Sumedi Andono Mulyo, MA, Ph.D, Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Bappenas:

Dana desa diharapkan dapat mengakumulasi berbagai modal (salah satunya) adalah modal sumber daya alam dan lingkungan, modal dana bergulir, modal sosial, dan akumulasi modal pengetahuan. Yg menjadi *missing link* adalah menyangkut kebutuhan masyarakat desa dimana pemprov/pemkab/kota juga dapat mendorong kegiatan desa sehingga *multilier effectnya* menjadi besar.

Q: Marulam J Hutauruk_Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI_Tentang Ekonomi

Bagaimana Perencanaan Pembangunan Regulasi dan/atau Infrastruktur *One Gateway System Digital Transaction* yang mengatur transaksi asset-asset *intangible* Karya Anak Bangsa Indonesia yang saat ini sudah sangat massive terjadi di dunia online tanpa diproteksi oleh negara?

Perlu perencanaan Regulasi *One Gateway System Digital Transaction* dan/atau infrastruktur berupa server Nasional.

A: Tanggapan Ibu P.N. Laksmi K., SE, MSE, MSc, PLT Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional:

Masukan yg diperoleh ini sangatlah bagus sehingga terkait *One Gateway System Digital Transaction* dapat dikembangkan dan menjadi perhatian pemerintah. Saat ini kami sedang menyusun peraturan terkait protection system tersebut.

Q:

Guruh Wicaksono - Universitas Indonesia

Saya melihat dalam pembangunan infrastruktur didaerah, tidak dibarengi dengan pengembangan drainase, padahal dalam setiap pembangunan prioritas nya adalah salah satunya perubahan iklim. saya dikalimantan timur, hal ini terjadi dalam setiap pembangunan infrastruktur terutama jalan. sehingga ini sangat bermasalah kepada kesehatan rumah tinggal karena harus mengorbankan beberapa rumah yang rendah menjadi penampungan pembuangan limbah rumah tangga. kemudahan Untuk Reformasi kesehatan, Bagaimana Upaya Pemanfaatan Tenaga Beasiswa Pemerintah Pasca NS, baik medis maupun non medis untuk dilibatkan dalam pembangunan nasional? sehingga dapat memenuhi kompetensi profesional, baik didalam akademik maupun tekhnis pelayanan kesehatan.

Tanggapan Bpk. Ir. Medrilzam, M.Prof. Econ, Ph.D, Direktur Lingkungan Hidup, Bappenas:

- Kedepan, Pemerintah c.q Bappenas tidak ingin *Business As Usual*, namun dalam menyusun kebijakan, juga mengaitkan antar kebijakan lainnya, seperti ekonomi, pembangunan infrastruktur lingkungan hijau dan *climate change*.
- Pemerintah ingin menyejajarkan penurunan emisi dengan salah satunya melalui pembangunan infrastruktur. Misalnya: mendorong *renewable energy* di berbagai sektor
- Konsep perubahan iklim juga masuk kedalam pembangunan tiap sektornya. Tidak hanya di energy saja namun juga kehutanan dan limbah.
- Dari hasil proyeksi iklim yg dilakukan, Indonesia kedepannya akan dihadapkan oleh iklim yg ekstrem
- Semua sektor harus siap dalam merespon isu perubahan iklim, karena ternyata *climate change* dapat berpengaruh atau memberi dampak pada sektor-sektor lainnya

Paparan Tambahan oleh Bapak Sumedi MA, Ph.D, Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana, Bappenas:

- **Reformasi Sistem Ketahanan Bencana** terdapat 3 komponen prasyarat: database, kolaborasi (penta helix), dan konektivitas dengan system pendukung pemulihan krisis

- Fokus Investasi dalam Reformasi Sistem Ketahanan Bencana adalah peningkatann kesiapsiagan di masa pra bencana, penguatan system operasi tanggap darurat, dan penguatan kapasitas adaptif dan ketangguhan masyarakat
- Yg menarik adalah mencermati bagaimana paradigma masyarakat terhadap lingkungan alam, paradigma di masyarakat terhadap bencana ini ternyata berbeda-beda antar daerahnya
- Kajian terkait perspektif paradigma terkait kebencanaan berdasarkan kewilayahan akan kami kembangkan lebih jauh lagi

Tanggapan Bpk Dr. Muhammad Cholifihani, SE, MA , Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Bappenas:

- Terkait daerah perbatasan, Program Keluarga Harapan (PKH) sudah masuk ke pelosok daerah, namun tantangan selanjutnya adalah bagaimana Jamsosnya terlebih BPJS Ketenagakerjaan, Pensiun, dll.
- Untuk Reformasi Perlindungan Sosial, kami melakukan reformasi terkait Jamsos yg akan diberikan perlindungan jamsos bagi lansia yang produktif, kesehatan (iuran dan jamsos)
- Yang menjadi tantangan UMKM adalah terkait *database*, dimana akan kami upayakan data disamakan dengan data jamsos yg akan diberikan.

Tanggapan Ibu Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS, Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Bappenas:

- Pemerintah c.q Bappenas memberi fokus perlindungan bagi anak, indikator terkait perlindungan anak dalam RKP dan RPJMN, dan saat ini kami sedang menyusun stranas pencegahan pernikahan anak.
- Untuk tahun 2021, BAK sudah akan dikeluarkan terkait perlindungan perempuan dan anak
- Penguatan pengarusutamaan gender penting untuk menjadi perhatian di semua sektor
- Kami juga mendorong kewirausahaan pemuda, untuk menghindari silo-silo, karena upaya sinergi data sangat penting diupayakan agar upaya kewirausahaan yg dilakukan tidak dilakukan berulang-ulang, sama datanya dengan data program kewirausahaan/UMKM yg telah ada.

Tanggapan Bpk Dr. Ir. Yahya Rachmana Hidayat, MSc Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Bappenas:

- Permasalahan EBT utamanya adalah permasalahan perekonomian, dimana kita masih banyak impor dari luar negeri. Jika kita ingin mengoptimalkan EBT maka kita harus mengandalkan industri dalam negeri.
- Permasalahan EBT yg perlu dilakukan percepatan adalah terkait perekonomian, lahan, investasi atau dana murah, banyak investor yg ingin menanamkan dananya, tapi *chanellingnya* tidak dapat dilakukan dengan cepat

- Saat ini sedang dijabari oleh OJK agar dana murah dari tiap perbankan dapat dengan mudah dan cepat diakses oleh investor dalam ataupun luar negeri.

SESI PENUTUPAN

Penyampaian Hasil Diskusi dan Tindak Lanjut oleh Bu Diani, Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Bappenas:

- Hal yang penting dan menarik untuk *dihighlight* adalah terkait **Reformasi Sistem Kesehatan Nasional** adalah **pembangunan preventif kesehatan** harus dibangun melalui **puskesmas** yg merupakan garda terdepan dan bersifat *bottom-up* sehingga reformasi kesehatan diarahkan ke *preventive focused* model.
- Terkait **Reformasi Sistem Perlindungan Sosial**, yakni terkait tantangan **Integrasi data** merupakan salah satu solusi untuk pengurangan kemiskinan sehingga kebijakan bantuan sosial tepat sasaran.
- Pada bidang **Reformasi Kebencanaan**, pola kebijakan terkait kebencanaan kedepan harus lebih bertumpu pada kesiapan tiap KL sehingga dapat meminimalisir korban dan tercipta efisiensi anggaran kebencanaan.
Disaster risk management memerlukan dukungan dari pemerintah daerah, OMS, dan perguruan tinggi.
Riset dan Sosialisasi terkait potensi bencana harus dilakukan secara dini agar menciptakan kesiapan masyarakat sehingga tercipta masyarakat yang tanggap bencana.
- Pada bidang **Ekonomi dalam Penanggulangan COVID-19**, yaitu pentingnya *database* UMKM sebagai bagian dari peningkatan kapasitas sekaligus peningkatan akurasi pemberian bantuan pemerintah kepada UMKM, tantangan UMKM Kedepan adalah untuk mendorong UMKM *go digital* dan memanfaatkan *market place* dan sosial media.
Investasi masa depan harus berfokus pada *low carbon development* sebagai bentuk upaya pemerintah untuk menjaga kebijakan moneter.
- **Dan**, pada bidang **Ekonomi Hijau dan Rendah Karbon**, pola pembangunan kedepan harus mengkombinasikan kebijakan industrialis dan ekonomi hijau, Covid-19 merupakan momentum untuk melakukan resetting agenda pembangunan ekonomi hijau kedepan, mengambil peluang penerapan ekonomi hijau sebagai pendorong kegiatan ekonomi contohnya seperti di Bali dan Lombok.

Sesi Penyampaian Slido terkait Kata Kunci Isu Strategis Pembangunan

- **Highlight** kata kunci isu strategis terbanyak disampaikan terkait **Fokus Pembangunan di Indonesia** adalah Reformasi Regulasi, Utang Negara, Kesehatan, Pendidikan, Bencana, Hukum.

3. Lampiran 3

Hasil Graphic Recorder dalam Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik



4. Lampiran 4

Paparan Deputy Bidang Pemantauan Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Bappenas

